JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Tapanuli Selatan

Soritua Ritonga[1)], Effan Zulfiqar[2)]

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Indonesia

soritua.ritonga@um-tapsel.ac.id[1)]
effan.zulfiqar@um-tapsel.ac.id[2)]

Submitted: 16/10/2026; Revised: 30/10/2026; Accepted: 05/11/2026; Published: 05/11/2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir dan kendala apa saja dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan yang diambil yang bisa menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya merehabilitasi korban belum maksimal, dikarenakan belum terlihatnya BPBD dalam merehabilitasi rumah-rumah warga dan juga lingkungan desa. Kerusakan rumah warga dan lingkungan pasca banjir tidak direhabilitasi BPBD dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum sehingga masyarakat merasa adanya pembiaran setelah banjir terjadi. Seharusnya pihak BPBD melakukan pendataan berapa rumah yang perlu direhabilitasi atau fasilitas umum yang rusak untuk segera diperbaiki. Begitu juga upaya memulihkan trauma para korban, belum disediakan oleh pihak BPBD melainkan ada dari pihak TNI yang membantu.

Kata kunci: Upaya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Penanggulangan Bencana, Banjir

Abstract

This study aims to determine how the Regional Disaster Management Agency (BPBD) efforts in flood disaster management and what obstacles in flood disaster management in Sipange Siunjam Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency. The research method used is qualitative research by collecting data through interviews with informants who were taken who could answer the problem. The results of the study indicate that the efforts of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in flood disaster management in Sipange Siunjam Village, Sayur Matinggi District, South Tapanuli Regency, especially in rehabilitating victims have not been optimal, because the BPBD has not been seen in rehabilitating residents' houses and also the village environment. Damage to residents' houses and the environment after the flood was not rehabilitated by the BPBD with the Public Works Department so that the community feels there is negligence after the flood occurred. The BPBD should have conducted a data collection on how many houses need to be rehabilitated or damaged public facilities to be repaired immediately. Likewise, efforts to heal the victims' trauma have not been provided by the Regional Disaster Management Agency (BPBD), but rather by the Indonesian National Armed Forces (TNI).

***Key words**: Efforts, Regional Disaster Management Agency (BPBD), Disaster, Flood*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

PENDAHULUAN

Bencana merupakan peristiwa yang terjadi karena faktor alam maupun akibat ulah manusia yang menyebabkan kerusakan dimana-mana. Bencana bisa membawa kerugian bagi manusia yang menimpanya. Kerugian tersebut bisa menyebabkan kematian, kerugian materil maupun kerusakan lingkungan atau alam. Sehingga bencana bisa dikatakan sebagai peristiwa yang bisa menyebabkan kerusakan. Menurut pendapatnya Nurjanah dkk, definisi bencana adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya. (Nurjanah, dkk, 2012:6)

Bencana dapat terjadi karena faktor alam yaitu gempa bumi atau gunung meletus serta bencana tsunami, non-alam disebabkan oleh gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial, tindak kriminal, atau kecelakaan industri, atau faktor manusia karena pencemaran lingkungan, kebakaran hutan, dan kecelakaan industri. Sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian material, hingga korban jiwa. Selama ini bencana yang terjadi di Indonesia umumnya adalah diakibatkan oleh alam dan manusia. Pengertian bencana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (1) yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat (5) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana. Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. (Susanto, 2006:9)

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, penyebabnya bisa dikarenakan meluapnya air laut atau sungai maupun intensitas hujan yang terlalu tinggi. banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di selokan sungai. Banjir menurut pendapat Astuti (2014:76) merupakan kondisi dimana tingginya aliran air sungai yang melebihi dari muka air normal sehingga meluap dari sungai dan menyebabkan adanya genangan pada lahan yang lebih rendah dari sisi sungai itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan banjir merupakan kondisi air sungai meluap yang disebabkan debit air banyak dan tidak bisa tertampung atau mengalir sebagaimana mestinya.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Banjir menurut pendapat Rosyidie (2013) merupakan kondisi dimana terendamnya suatu daerah daratan karena debit air yang meningkat. Banjir dapat menyebabkan kerugian fisik maupun non fisik sehingga menimbulkan korban seperti sekolah diliburkan dan harga barang kebutuhan pokok meningkat. Banjir dapat didefinisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa banjir merupakan *keadaan dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar.* Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan yang turun. *Banjir* merupakan *bencana* alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan.

Sebagai implementasi amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 10 Ayat (1), Pemerintah sebagaimana dimaksud membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditugasi dalam menanggulangi bencana di seluruh Indonesia baik pencegahan, mitigasi, ataupun rehabilitasi bencana. Sementara untuk lingkup daerah sesuai amanat undang-undang yang sama pada Pasal 18 Ayat (1) yaitu Pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dimana BPBD Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Desa Sipange Siunjam November 2024 lalu terjadi banjir yang mengakibatkan ratusan rumah di desa itu mengalami kerusakan. Selain itu, 67 rumah mengalami kerusakan berat dan 65 rumah rusak ringan. Banjir juga mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2 orang meninggal dunia dan fasilitas sekolah rusak akibat banjir. Banjir yang terjadi di Desa Sipange Siunjam diakibatkan intensitas hujan yang tinggi dan Meluapnya sungai Batang Angkola. Dengan bencana yang dialami di Desa Sipange Siunjam tersebut tentunya sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban banjir, baik merugikan materil, kesehatan dan ada yang kehilangan tempat tinggalnya bahkan korban jiwa. Hal ini tentunya membutuhkan bantuan yang lebih ekstra untuk merehabilitasi para korban.

Tugas BPBD sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu : Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Upaya rehabilitasi setelah sebulan terjadinya bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan seharusnya berupa rehabilitasi yang meliputi penilaian kerusakan rumah dan infrastruktur yang ada disekitar lingkungan korban, pembersihan area terdampak termasuk rumah-rumah korban banjir, perbaikan infrastruktur disekitar area yang terdampak banjir, pemberian bantuan financial bersama Dinas Sosial, dan dukungan psikososial yaitu pemulihan trauma dengan psikolog.

Selama ini upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan hanya terlihat saat terjadi banjir seperti mengevakuasi korban yang rumahnya terdampak bencana banjir agar selamat saat banjir datang. BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan mendirikan tenda pengungsian bagi masyarakat yang dievakuasi. Mendirikan dapur umum untuk kebutuhan makan pengungsi dan membuat posko kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan para korban yang ada dipengungsian. Selain itu, BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan bekerja

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

sama dengan pihak-pihak lain diantaranya adalah Dinas Sosial untuk pemberian bantuan sosial bagi korban, Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para korban serta unsur TNI dan aparatur desa yang ada untuk membantu mengevakuasi korban banjir.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut pendapat Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk "meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan mengambil 9 orang informan penelitian yang bisa menjawab permasalahan. Dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara langsung dan dokumentasi. Dianalisis secara kualitatif yaitu dengan tahapan pengumpulan data, penyajian data hasil dengan narasi dan penarikan kesimpulan yang diharapkan bisa memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Bencana banjir yang merupakan peristiwa dimana air menggenangi suatu wilayah dan menyebabkan korban baik materil sampai korban jiwa, mesti diantisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab yakni BPBD. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia.

Seperti yang terjadi di Desa Sipange Siunjam yang terjadi sehingga menyebabkan kerusakan di lokasi. Untuk itu BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan seharusnya bertindak semaksimal mungkin dalam menanggulangi bencana banjir. Selama ini upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan diantaranya adalah melakukan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi Sebagaimana yang disampaikan oleh Handi Febrial Batubara selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

> *Dalam melakukan penanggulangan bencana termasuk banjir, BPBD melakukan pemetaan untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko disekitar, selain itu memahami informasi peringatan dini cuaca apakah berpotensi terjadi bencana. Saat tanggap darurat BPBD melakukan evakuasi korban terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman, mendirikan posko darurat bencana dan dapur umum, memastikan segala bantuan baik makanan ataupun obat obatan tersedia dengan berkoordinasi*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

dengan pihak-pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan, TNI/Polri ataupun Satpol PP. Pasca bencananya melakukan rehabilitasi dengan memastikan bencana susulan sudah tidak ada lagi, lalu pembersihan segala material yang ada bekas bencana dan memulihkan trauma korban. (Wawancara dengan Handi Febrial)

BPBD merupakan garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat daerah. Sebagai komando utama, BPBD memastikan bahwa segala bentuk penanganan bencana berjalan dengan terkoordinasi, cepat dan tepat sasaran. Dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, dari sebelum, saat, hingga setelah bencana, BPBD memiliki peran strategis yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan. Peran BPBD sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

Selama ini apa yang diupayakan oleh BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah maksimal. Dalam melakukan rehabilitasi banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa BPBD hanya hadir dalam tahap darurat dengan membawa bantuan logistik beberapa hari setelah banjir terjadi, sementara proses pemulihan, seperti perbaikan infrastruktur dan pemulihan trauma belum dilakukan secara menyeluruh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Handi Febrial Batubara selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

Apa yang dilakukan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan telah maksimal dan terus berupaya agar semua permasalahan yang dihadapi korban dapat terselesaikan. Meskipun selama ini masih banyak masyarakat yang mengeluh kalau apa yang dilakukan BPBD selalu mendapat persepsi negatif dari masyarakat. Seperti misalnya BPBD hanya datang saat tanggap darurat saja setelah itu ditinggal dan dibiarkan. Pemulihan korban dan infrastruktur juga masih belum maksimal itu semua karena keterbatasan anggaran yang dimiliki BPBD, karena BPBD sifatnya hanya membantu membersihkan areal yang terdampak banjir saja dan membersihkan puing-puing material bersama TNI. (Wawancara dengan Handi Febrial)

Dalam melakukan rehabilitasi tentunya BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sendirian, melainkan melibatkan beberapa unsur dari pemerintahan dan instansi lainnya. Diantaranya adalah Dinas Sosial, Dinas PU, TNI, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Palang Merah Indonesia. Dalam tahap rehabilitasi setelah banjir, BPBD berfokus pada perbaikan dan pemulihan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar kembali normal. Tentunya harus melibatkan atau berkoordinasi dengan pihak lainnya.

2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Ada beberapa kendala yang dihadapi BPBD dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, diantaranya yaitu keterbatasan anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana atau kelengkapan operasional, jumlah sumber daya manusia, serta koordinasi yang kurang optimal di lapangan baik saat tanggap darurat dan juga pasca bencana sehingga menyebabkan dalam menanggulangi bencana sering tumpang tindih dengan instansi lainnya. Seperti hasil wawancara dengan Handi Febrial Batubara selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu :

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Tentunya BPBD masih memiliki keterbatasan anggaran untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif, padahal pembangunan infrastruktur tahan bencana dan sistem peringatan dini membutuhkan investasi yang besar dan pemerintah kabupaten belum cukup mendanai itu. Kemudian kuantiti dari sumber daya manusia alias kekurangan pegawai, maka BPBD memperbanyak jumlah honorer untuk membantu di lapangan melakukan aksi-aksi atau tindakan kepada korban, bahkan BPBD menyertakan para relawan untuk menambah jumlah operasional di lapangan. Wilyah Tapanuli Selatan ini cukup luas, tetapi jumlah dan kelengkapan sarana dan prasarana masih kurang misalnya perahu karet, jaket pelampung untuk korban, sarana komunikasi personil di lapangan serta pembekalan darurat itupun dibantu oleh instansi lain misalkan tenda dibantu oleh Dinas Sosial. (Wawancara dengan Handi Febrial)

Salah satu yang menjadi kendala dalam menanggulangi bencana di daerah adalah kurang optimalnya koordinasi BPBD antar personil dan koordinasi dengan instansi lainnya, contohnya tumpang tindih tugas masing-masing instansi yang terlibat dalam penanganan bencana, cenderung bersemangat untuk menunjukkan eksistensinya dan melampaui tugas pokok dan fungsinya, padahal ada lembaga lain yang lebih berwenang. Informasi yang tidak jelas, kurangnya komunikasi yang efektif membuat pembagian tugas di lapangan tidak teratur, yang dapat menyebabkan kebingungan di antara tim penyelamat dan relawan. Ketika bencana terjadi, penanganan di lapangan masih terfragmentasi. BPBD belum berfungsi maksimal sebagai komando yang mengkoordinasi semua elemen, sehingga penanganan tidak terintegrasi dengan baik. Masyarakat tidak tahu harus mengungsi ke mana, kurangnya koordinasi yang terarah dengan instansi terkait membuat masyarakat bingung saat proses evakuasi dan harus menyelamatkan diri masing-masing.

Untuk keterbatasan anggaran, BPBD dapat menerapkan berbagai strategi yang berfokus pada efisiensi, prioritas, dan kolaborasi. Pendekatan ini memastikan sumber daya yang ada digunakan secara maksimal untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Artinya memprioritaskan terlebih dahulu yang dianggap penting dalam melakukan penyelematan korban agar anggaran yang ada bisa efesien dan efektif. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia, BPBD melakukan perekrutan relawan dari tiap tiap desa. Sementara untuk mengoptimalkan koordinasi BPBD melakukan komunikasi yang baik terhadap personil BPBD, serta berkomunikasi dengan instansi lain sebelum penanganan bencana di lapangan agar lebih jelas lagi perannya masing-masing.

Pembagian peran dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik bagi setiap instansi terkait, termasuk TNI, Polri, relawan, dinas-dinas terkait, hal ini akan mencegah tumpang tindih dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia. BPBD membangun dan memelihara sistem komunikasi yang andal, seperti radio, surel, dan jaringan seluler, untuk memastikan komunikasi yang cepat dan lancar saat tanggap darurat. BPBD memastikan penyebaran informasi yang akurat, mutakhir, dan terstruktur kepada semua pihak terkait dan masyarakat luas. Informasi ini mencakup peringatan dini, situasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil, sehingga tidak lagi adanya tumpang tindih perannya masing-masing serta terkoordinasi dengan baik.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

SIMPULAN

Ada beberapa poin penting dari pembahasan sebelumnya yang bisa ditarik kesimpulan yaitu;

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya merehabilitasi korban belum maksimal, dikarenakan belum terlihatnya BPBD dalam merehabilitasi rumah-rumah warga dan juga lingkungan desa. Kerusakan rumah warga dan lingkungan pasca banjir tidak direhabilitasi BPBD dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum sehingga masyarakat merasa adanya pembiaran setelah banjir terjadi. Seharusnya pihak BPBD melakukan pendataan berapa rumah yang perlu direhabilitasi atau fasilitas umum yang rusak untuk segera diperbaiki. Begitu juga upaya memulihkan trauma para korban, belum disediakan oleh pihak BPBD melainkan ada dari pihak TNI yang membantu.

Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Sipange Siunjam Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan diantaranya adalah keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia atau personil sehingga BPBD belum melakukan rehabilitasi secara maksimal membantu warga pasca banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Kodoatie dan Sjarief, 2006, *Pengelolaan Bencana Terpadu: Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami*, Jakarta; Yarsif Watampone

Nurjanah, dkk., 2012, *Manajemen Bencana*, Bandung : Alfabeta

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Becana Nomor 11 tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Ramli, Soehatman, 2010, *Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001*. Jakarta : Dian Rakyat

Rosyidie, 2013, *Banjir: Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan. Guna Lahan*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 24, Nomor 3

Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

Susanto, 2006, *Sebuah Pendekatan Strategic Management: Disaster Management di Negeri Rawan Bencana*, Jakarta : The Jakarta Consulting Group

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.